

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Isu lingkungan dalam studi hubungan internasional (HI) telah menjadi pembahasan sentral dalam berbagai agenda global. Hampir semua ilmuwan HI sepakat menjadikan ancaman terhadap lingkungan sebagai salah satu masalah global yang paling mendesak untuk ditangani (Bakry, 2017). Berbagai permasalahan lingkungan yang mencakup polusi air, udara, dan tanah kian memperburuk keadaan lingkungan global. Akibatnya selama 20 tahun terakhir, emisi gas rumah kaca meningkat drastis, kawasan hutan tropis yang luas menghilang, dan ratusan spesies fauna dan flora punah (Sarikulov & Khakimova, 2024).

Upaya mitigasi tentunya telah dilakukan oleh berbagai negara untuk mengatasi permasalahan lingkungan global. Pembentukan konvensi dan perjanjian internasional menjadi salah satu upaya global yang berusaha mengatur perilaku negara untuk mengurangi dampak masalah lingkungan. Bagi kaum realis upaya tersebut akan menimbulkan ketergantungan sehingga mengurangi *power* negara. Sedangkan kaum liberal menyambut upaya tersebut dengan menekankan pentingnya organisasi internasional sebagai aktor yang memfasilitasi dan menyediakan insentif bagi kerja sama global dibidang lingkungan (Bakry, 2017).

Dalam konteks global, peran organisasi internasional telah banyak memfasilitasi negara untuk mengatasi masalah lingkungan dengan memberikan bantuan lingkungan. Bantuan lingkungan merupakan

mekanisme penting bagi negara berkembang untuk mengintegrasikan upaya mitigasi dengan pertumbuhan ekonomi ditengah tantangan lingkungan global. Disisi lain, negara maju memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung upaya konservasi negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan lingkungan (McCarthy, Sternberg, & Banda, 2023). Oleh karena itu seiring perkembangan global, trend bantuan lingkungan semakin meningkat dan kian menjadi mekanisme utama negara-negara berkembang untuk mengatasi permasalahan lingkungan.

Global Environment Facility (GEF) menjadi salah satu organisasi internasional yang menyediakan mekanisme bantuan lingkungan kepada negara berkembang. GEF berkembang sebagai institusi keuangan multilateral yang dibentuk pada tahun 1991 untuk membantu mengatasi masalah lingkungan global. GEF menghimpun dana bantuan dari anggotanya yang utamanya berasal dari negara-negara maju sebagai negara pendonor. GEF kemudian menyalurkan bantuan dana tersebut ke anggotanya sebagai negara penerima utamanya negara berkembang. Terbentuknya GEF merupakan bentuk keprihatinan negara-negara industri atas masalah lingkungan global sehingga mendorong pembentukan mekanisme bantuan lingkungan kepada negara berkembang (Nyekwere, 2017).

GEF menyalurkan bantuan dana untuk membiayai proyek-proyek berbasis lingkungan negara anggotanya melalui mekanisme yang telah diatur. Bantuan GEF disalurkan dalam setiap periode yang disebut fase

dengan rentang waktu empat tahun. Hingga tahun 2025, GEF memasuki fase kedelapan (2022-2026) dengan total 186 negara anggota (GEF, 2025). Bantuan GEF disalurkan untuk membiayai proyek lingkungan yang mencakup sektor perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, degradasi tanah, pencemaran kimiawi, keanekaragaman hayati, dan masalah air global. Mengingat masalah lingkungan yang harus dibiayai cukup banyak, GEF mengembangkan mekanisme alokasi dana khusus untuk memprioritaskan bantuan pada tiga sektor utama yakni keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan degradasi lahan (Qur'ani, 2014).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak luput menjadi negara anggota GEF yang mulai bergabung pada tahun 1992. Kondisi geografis Indonesia tersebut memberikan *landscape* alam berupa kawasan hutan yang luasnya 63% dari total luas wilayah Indonesia (Adnan & Dadi, 2023). Kawasan hutan Indonesia tersebut cukup vital berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mendukung keanekaragaman hayati, mengatur iklim, serta menopang masyarakat lokal dan global (Gunawan, Mulyanto, & Suharti, 2024). Dengan kondisi alam tersebut, masalah lingkungan yang dihadapi Indonesia tentunya akan berdampak secara global.

Masalah lingkungan Indonesia pada sektor perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan cukup menjadi masalah krusial terhadap kondisi alam Indonesia. Dalam pengamatan suhu di Indonesia sejak 1981, Indonesia mencetak rekor baru suhu terpanas dengan rata-rata

peningkatan suhu udara sebesar 0,8°C pada tahun 2024. Namun adanya degradasi lahan khususnya kawasan hutan kian melemahkan kemampuan hutan Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim tersebut. Tercatat sekitar 7,3 juta hektare kawasan hutan telah beralih fungsi dari tahun 1984 hingga 2020. Degradasi lahan hutan tersebut juga turut menyebabkan hilangnya habitat asli flora dan fauna sehingga menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati (Gunawan, Mulyanto, & Suharti, 2024).

Semenjak bergabung pada fase pertama hingga saat ini, Indonesia terus mendapat bantuan pendanaan proyek untuk mengatasi masalah lingkungannya baik yang berfokus pada satu sektor maupun beberapa sektor sekaligus. Salah satu program bantuan lingkungan GEF yang mendapat pendanaan yakni “*Sevent Operational Phase of The GEF Small Grants Programme in Indonesia*” pada fase ketujuh (2018 – 2022). Program tersebut mencakup tiga sektor prioritas GEF sekaligus yakni keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan degradasi lahan. Program tersebut bertujuan membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan sosial-ekologis dengan mendukung pendampingan kegiatan berbasis masyarakat yang berdampak pada lingkungan global (GEF, Projects & Operations, 2025).

Program tersebut dilaksanakan di bentang alam dalam kawasan biogeografi *Wallacea* Indonesia yakni Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur; zona penyangga Suaka Margasatwa Nantu Boliyohuto; Provinsi Gorontalo; Daerah Aliran Sungai (DAS) Balantieng, Provinsi Sulawesi Selatan; dan DAS Bodri, Provinsi Jawa Tengah. Keempat

wilayah tersebut dipilih melalui konsultasi dengan pemerintah dan mitra masyarakat berdasarkan beberapa kriteria diantaranya memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, keberadaan masyarakat lokal yang terpinggirkan, dan adanya proses degradasi lahan progresif yang tidak berkelanjutan.

Program Seventh Operational Phase of The GEF Small Grants Programme in Indonesia termasuk dalam kategori Small Grant yang akan dibawah langsung oleh tim *Small Grants Programme (SGP) Indonesia*. SGP Indonesia bertanggung jawab mengelola dan menyalurkan dana hibah GEF di Indonesia. SGP Indonesia mengelola beragam kegiatan bersama Lembaga Swadaya asyarakat (LSM), komunitas lokal, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat lainnya. Dalam implementasi program GEF, SGP Indonesia akan mendukung kegiatan berbasis masyarakat yang spesifik di setiap wilayah dengan mendorong tindakan kolektif dalam pengelolaan bentang alam adaptif sehingga menciptakan dampak lingkungan lokal maupun global (SGP, 2025).

Dampak bantuan GEF telah banyak berhasil membantu mengatasi permasalahan lingkungan lokal maupun global. Dalam penelitian Ika Zahara Qur'ani (2014) yang berjudul “Bantuan Multilateral Global Environment Facility Terhadap Cina” menyebutkan bahwa berdasarkan hasil survey kepada sejumlah pihak masyarakat dan pejabat Cina, bantuan GEF berkontribusi penting dalam membangun kapasitas lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap lingkungan,

meningkatkan inovasi teknologi hijau, serta memperluas lapangan kerja (Qur'ani, 2014).

Dalam penelitian lain, Zelya Nadia Kirana (2022) yang membahas “Peran UNDP-GEF dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu melalui Proyek EPASS Periode 2016-2020” menyimpulkan bahwa melalui proyek EPASS, UNDP/GEF telah memberikan banyak bantuan teknis maupun finansial kepada masyarakat sehingga mendorong peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Selain itu, UNDP/GEF mendorong terwujudnya kerja sama yang harmonis antara Balai Besar TNLL dengan pemerintah desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (Kirana, 2022).

Berbagai penelitian tersebut telah menggambarkan bagaimana implementasi bantuan dan peran GEF. Namun belum banyak ditemukan penelitian terkait strategi dan dampak lingkungan dari implementasi program bantuan GEF. Oleh karena itu, penulis hendak membahas implementasi program bantuan multilateral GEF dalam mengatasi masalah lingkungan di Indonesia. Penulis akan menggambarkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh GEF untuk melaksanakan program “*Sevent Operational Phase of The GEF Small Grants Programme in Indonesia*” dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dalam mengatasi permasalahan lingkungan Indonesia.

1.2 BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

Penulis hendak membatasi penelitian ini ke salah satu wilayah penerima bantuan program ini yakni Daerah Aliran Sungai (DAS) Balantieng, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi tersebut karena DAS Balantieng menjadi lanskap pertama yang mendapat bantuan GEF dengan fokus 3 sektor prioritas sekaligus (keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan degradasi lahan) di Sulawesi Selatan. Sehingga menarik perhatian penulis untuk melihat implementasi bantuan GEF dilokasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Bagaimana strategi implementasi program *Sevent Operational Phase of The GEF Small Grants Programme in Indonesia* di Kabupaten Bulukumba?
- 2) Bagaimana dampak lingkungan implementasi program *Sevent Operational Phase of The GEF Small Grants Programme in Indonesia* di Kabupaten Bulukumba?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui strategi implementasi program *Sevent Operational Phase of The GEF Small Grants Programme in*

Indonesia dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Kabupaten Bulukumba.

2. Mengetahui dampak lingkungan implementasi program *Sevent Operational Phase of The GEF Small Grants Programme in Indonesia* dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Kabupaten Bulukumba.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu:

1. Memberikan kontribusi gagasan serta informasi bagi akademisi Hubungan Internasional, baik dosen maupun mahasiswa, dalam melakukan kajian mengenai bantuan lingkungan yang diberikan oleh GEF dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bulukumba.
2. Menjadi tambahan informasi, bahan pembelajaran, serta referensi pertimbangan bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian mengenai lingkungan.

1.4 KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teori dan konsep dalam studi hubungan internasional. GEF merupakan organisasi internasional yang menyediakan bantuan lingkungan secara global. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori dan konsep peran organisasi

internasional dan bantuan luar negeri dalam menganalisis pelaksanaan program bantuan GEF di Kabupaten Bulukumba.

1.4.1. Peran Organisasi Internasional

Kemunculan organisasi internasional dikonstruksi melalui berbagai pandangan studi HI untuk menjalin hubungan antar-negara. Margaret P. Karns and Karen A. Mingst dalam bukunya mendefinisikan organisasi internasional sebagai organisasi yang keanggotaannya terdiri minimal tiga negara yang mempunyai kegiatan di beberapa negara, dan disatukan oleh perjanjian internasional (Karns & Mingst, 2004).

Selain aktor yang bersifat antarnegara, entitas lain dengan berbagai dasar hukum (publik dan swasta, internasional dan domestik) dan dengan keanggotaan hibrida (negara, masyarakat sipil, bahkan komersial) dapat dikualifikasikan sebagai organisasi internasional jika mereka dipercayakan untuk memenuhi fungsi demi kepentingan publik global (Golia & Peters, 2022).

Eksistensi organisasi internasional yang semakin berkembang menjadikan organisasi internasional memegang peran penting dalam berbagai aspek global. Pandangan fungsionalisme menggambarkan bahwa alasan keberadaan organisasi internasional adalah untuk memenuhi tugas-tugas tertentu (fungsi), yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang menyangkut lebih dari satu negara (Golia & Peters, 2022). Pandangan tersebut kemudian

mendorong gagasan para ahli untuk melihat dan menganalisis bagaimana peran organisasi internasional dalam permainan global.

Dalam tulisannya, J. Joachim, B. Reinaldi dan B. Verbeek mengemukakan teori implementasi organisasi internasional yang memberikan peran kepada organisasi internasional untuk menjamin bahwa masing-masing negara menjalankan komitmen internasional dalam mencapai tujuan bersama. Teori tersebut memperkenalkan tiga pendekatan implementasi organisasi internasional yakni sebagai berikut (Joachim, Reinaldi, & Verbeek, 2008) :

1. Pendekatan penegakan (*enforcement approach*) merupakan pendekatan yang menekankan penegakan melalui pemantauan dan pemberian hukuman. Pendekatan penegakan bertujuan untuk mempengaruhi serta memastikan aktor negara tidak mengingkari komitmen yang telah disetujui secara internasional. Apabila negara melakukan pelanggaran, maka negara harus bersedia menerima hukuman atau sanksi sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran implementasi pelaksanaan program.
2. Pendekatan manajerial (*managerial approach*) merupakan pendekatan yang berfokus pada proses interaksi antara organisasi internasional dan para pihak terkait melalui transparansi dan interpretasi aturan, serta penyelesaian

masalah. Pendekatan tersebut dianggap lebih bersifat persuasif dibandingkan pendekatan penegakan, karena melalui pendekatan ini para aktor memiliki kemampuan untuk menjalankan kerja sama secara kooperatif. Dalam implementasinya, organisasi internasional memiliki peran yang mencakup: 1) melakukan kerja sama dengan berbagai aktor 2) memberikan bantuan teknis dan keuangan, 3) mendukung pengembangan kapasitas, dan 4) melakukan pengawasan.

3. Pendekatan normatif (*normative approach*) merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya legitimasi dan/atau otoritas organisasi internasional. Bentuk legitimasi dan/atau otoritas yang dimaksud mencakup kemampuan mengendalikan informasi dan keahlian yang memberikan negara pengetahuan teknis serta pelatihan khusus, sehingga mendorong negara untuk mematuhi eksistensi organisasi internasional. Kepatuhan tersebut selanjutnya akan memperkuat kepercayaan terhadap organisasi internasional sebagai aktor yang rasional, dan tidak berpihak (Joachim, Reinaldi, & Verbeek, 2008).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan manajerial (*managerial approach*) karena lebih relevan untuk menganalisis peran GEF sebagai organisasi internasional yang

memberikan bantuan keuangan untuk mencapai tujuan bersama. Penulis akan melihat dan mendeskripsikan bagaimana strategi yang dilakukan GEF untuk menyalurkan bantuannya di Kabupaten Bulukumba.

1.4.2. Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri telah menjadi mekanisme yang banyak digunakan oleh negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Beberapa tokoh internasional yang memperkenalkan konsep bantuan luar negeri yaitu:

1. Hans Morgenthau (1962) mengartikan bantuan luar negeri sebagai penyediaan bantuan keuangan dan material oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang yang mencakup berbagai bidang termasuk bantuan militer, bantuan kemanusiaan, bantuan ekonomi atau pembangunan (Malacalza, 2024).
2. K.J Holsti (1987) mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai pengiriman dana, barang, atau nasehat teknis yang diberikan negara donor ke negara penerima sebagai sarana kebijakan yang biasa digunakan dalam hubungan luar negeri. Menurutnya ada 4 bentuk bantuan yakni bantuan militer, bantuan teknik, grants (hibah dan program impor komoditi), dan pinjaman pembangunan (Magfira, 2023).

3. Lancaster (2007) mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai bentuk transfer sukarela sumber daya publik dari suatu pemerintah ke pemerintah lainnya, ke suatu organisasi nonpemerintah, atau ke suatu organisasi internasional. Bantuan luar negeri tersebut dapat mendanai beragam kegiatan, mulai dari proyek investasi dan kegiatan penelitian, program reformasi ekonomi atau politik, pelatihan teknis, dan bantuan kemanusiaan (Ramadina, Rezasyah, & Yulianti, 2019)

Seiring perkembangan kepentingan global, bantuan luar negeri telah mencakup berbagai bidang salah satunya bidang lingkungan. Bantuan luar negeri yang berfokus pada kepentingan lingkungan telah menjadi mekanisme negara penerima untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan global. Kemunculan bantuan untuk kepentingan lingkungan menjadi perdebatan para aktivis lingkungan yang melihat dampak bantuan tersebut terhadap kondisi lingkungan di negara penerima. Para aktivis lingkungan meragukan sejauh mana dampak bantuan lingkungan mampu menangani masalah lingkungan di negara penerima. Hingga pada akhirnya, istilah bantuan lingkungan semakin sering digunakan dalam banyak wacana (Dewi, 2020).

Bantuan lingkungan berupaya untuk memberikan dampak kepada negara penerima untuk menyelesaikan masalah lingkungan sesuai dengan kriteria negara pendonor. Bantuan lingkungan

pada umumnya akan berupa bantuan biaya pelaksanaan proyek berbasis lingkungan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Robert L. Hicks et al. (2008) mengembangkan sebuah konsep bantuan luar negeri yakni *project-level aid* atau PLAID yang digunakan untuk menilai sejauh mana dampak proyek bantuan luar negeri terhadap kondisi lingkungan di negara penerima.

Hicks et al. (2008) mengembangkan lima kategori dalam konsep PLAID sebagai indikator dalam menilai dampak proyek bantuan luar negeri di negara penerima (Dewi, 2020) :

1. *Environmental Strictly Defined* (ESD), merupakan kategori proyek yang dinilai memberikan dampak positif secara langsung terhadap kondisi lingkungan. Proyek bantuan yang tergolong dalam kategori ESD meliputi perlindungan daerah aliran sungai (DAS), konservasi energi, reforestasi, proteksi atau perlindungan terhadap biodiversitas, penyediaan akses air bersih, konservasi tanah, serta proyek mitigasi polusi udara.
2. *Environmental Broadly Defined* (EBD), merupakan kategori proyek pencegahan yang dinilai memberikan dampak positif terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Proyek bantuan yang tergolong dalam kategori EBD meliputi peningkatan efisiensi energi, reboisasi sektor industri, program

perencanaan keluarga, desalinasi, pengembangan keragaman genetik, dan pembangunan berkelanjutan.

3. *Neutral* (N), merupakan kategori proyek yang dinilai tidak memberikan dampak lingkungan secara langsung. Kategori *Neutral* mencakup proyek yang memiliki dampak positif dan negatif yang seimbang terhadap lingkungan. Proyek yang tergolong dalam kategori *neutral* adalah proyek ekonomi seperti promosi pasar bebas, dukungan bagi wirausaha kecil dan menengah, peningkatan aktivitas ekspor, bantuan pendidikan dan kesehatan, proyek telekomunikasi beserta infrastrukturnya, serta bantuan darurat bencana alam.
4. *Dirty Broadly Defined* (DBD), merupakan proyek yang dinilai memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dalam jangka menengah maupun panjang. Proyek yang tergolong dalam kategori DBD umumnya bergerak pada sektor agrikultur, pengembangan tenaga hidroelektrik, bioteknologi, pembangkit dan distribusi listrik, serta proyek transportasi umum.
5. *Dirty Strictly Defined* (DSD), merupakan kategori proyek yang secara langsung menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain merusak, proyek dalam kategori DSD juga dapat mengancam ketersediaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Proyek bantuan yang tergolong dalam kategori

DSD antara lain proyek industri berat seperti pupuk, pertambangan, penebangan hutan dengan pertumbuhan lambat, serta pembangunan jalan raya dan infrastruktur transportasi udara (Dewi, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus membahas bantuan multilateral GEF sebagai bantuan lingkungan yang telah memberikan bantuan pembiayaan proyek berbasis lingkungan kepada Indonesia. Penulis akan menggunakan konsep PLAID Robert L. Hicks untuk menggambarkan dampak implementasi proyek bantuan luar negeri terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Bulukumba. Penulis akan mengelompokkan dampak bantuan GEF ke dalam konsep PLAID tersebut sehingga akan mendeskripsikan implikasi bantuan GEF di Kabupaten Bulukumba.

Berikut merupakan bagan alur berpikir berdasarkan topik penelitian dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini :



1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif yang akan mendalami fenomena khusus pada kondisi obyek yang alamiah dan menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai hasil penelitian melalui pengumpulan data secara komprehensif. Proses penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang muncul,

mengumpulkan data terkait, kemudian menganalisisnya dengan mengaitkan temuan tersebut pada teori dan konsep dalam studi HI. Hasil dari uraian gambaran tersebut berupa deskripsi, penjelasan, dan validasi mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian. Metode tersebut digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta terkait strategi dan dampak implementasi bantuan GEF di Kabupaten Bulukumba.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dokumen resmi, artikel, serta situs-situs pendukung. Hasil data yang didapatkan tersebut digunakan untuk membantu menjawab permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan metode telaah pustaka (*library research*), observasi dan wawancara.

1. Telaah pustaka (*library research*) adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data melalui peninjauan berbagai literatur

yang relevan dengan permasalahan penelitian. Literatur tersebut mencakup buku, jurnal, dokumen resmi, artikel, serta berbagai sumber daring pendukung yang berkaitan dengan isu yang dikaji.

2. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian, serta mencatat setiap peristiwa secara objektif, autentik, dan tanpa rekayasa dalam rentang waktu tertentu. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di sejumlah desa di Kabupaten Bulukumba yang menjadi lokasi pelaksanaan program GEF.
3. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan informan untuk memperoleh informasi inti yang dibutuhkan. Data yang dihimpun melalui wawancara kemudian dianalisis untuk mengkaji isu yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program GEF di Kabupaten Bulukumba. Pihak tersebut meliputi Direktur Balang Institute sebagai Koordinator Program Wilayah Bulukumba, dan 9 Komunitas Masyarakat sebagai Mitra Kolaborasi Program GEF di Bulukumba.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis peran dan dampak bantuan GEF di Kabupaten Bulukumba. Tahapan analisis data dalam penelitian sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses merangkum, memilih informasi yang esensial, serta mentransformasi data mentah agar lebih terstruktur dan mudah dipahami, sehingga membantu peneliti dalam tahap pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data merupakan tahap menata informasi berdasarkan kategori atau kelompok tertentu, kemudian menyajikannya dalam bentuk uraian tertulis sehingga mampu menggambarkan kondisi yang diteliti.
3. Penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan makna dari temuan penelitian dalam bentuk pernyataan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami, disertai dengan pengecekan kembali untuk memastikan ketepatan dan validitas kesimpulan tersebut.

1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB 1 Pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian

BAB 2 Tinjauan Pustaka memuat deskripsi teoritis terkait variabel yang akan diteliti dengan mengkaji argument dan tinjauan teori yang relevan sebagai landasan penelitian.

BAB 3 Gambaran Umum memuat deskripsi mengenai permasalahan lingkungan di Indonesia, program bantuan GEF, dan program bantuan GEF di Indonesia.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian memuat analisis permasalahan penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul dengan menjabarkan keterkaitan setiap variabel yang ada dengan konsep/teori yang digunakan.

BAB 5 Penutup memuat rangkuman dari seluruh hasil penelitian berupa kesimpulan dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang telah diajukan serta saran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Organisasi Internasional

Kemunculan organisasi internasional dalam dinamika hubungan antar negara menciptakan berbagai pandangan dalam melihat konsep organisasi itu sendiri. Tiga kriteria awal yang menandakan suatu entitas sebagai organisasi internasional menurut Jan Klabbers yaitu dibentuk oleh negara-negara atau aktor yang berwenang mewakili negara, didirikan melalui instrumen yang diatur dalam perjanjian/hukum internasional, dan minimal harus memiliki sebuah organ yang mempunyai kehendak yang berbeda dari anggotanya (Bakry, 2017). Selain ketiga kriteria tersebut, terdapat dua kriteria penting yang juga menjadi pertimbangan berdirinya sebuah organisasi internasional. Pertama, tugas utama organisasi internasional itu sendiri yang tidak lain untuk memenuhi kepentingan global yang tidak bisa ditangani oleh satu aktor negara saja. Kedua, memiliki infrastruktur utama yang meliputi kedudukan, sarana infrastruktur, dan anggaran yang menunjang pertemuan-pertemuan dengan para anggotanya (Golia & Peters, 2022).

Menurut Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst melalui bukunya, organisasi internasional merupakan organisasi yang terdiri atas setidaknya tiga negara, yang berkegiatan di berbagai wilayah negara, dan yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian internasional yang bersifat resmi (Karns & Mingst, 2004). Selanjutnya menurut Graham Evans dan Jeffrey Newnham, organisasi internasional merupakan struktur

kelembagaan formal yang melewati batas-batas negara yang dibentuk melalui perjanjian internasional untuk mendorong adanya kerja sama internasional dalam berbagai bidang (Bakry, 2017).

Konseptualisasi organisasi internasional kemudian merambat kedalam paradigma HI yang lebih luas, menggabungkan teori hukum dan asumsi terkait dalam ilmu politik. Paradigma realisme yang memandang hubungan internasional sebagai perebutan kekuasaan oleh negara-negara sebagai aktor yang strategis mengklaim bahwa organisasi internasional bukanlah sebuah aktor melainkan sebuah forum ataupun instrumen ditangan negara-negara anggotanya. Realis menekankan bahwa organisasi internasional hanyalah sebuah mainan politik kekuasaan dan pelayan ambisi nasional. Akan tetapi pandangan realis gagal menangkap fakta bahwa negara biasanya mematuhi kewajiban yang berasal dari keanggotaannya disebuah organisasi internasional, bahkan ketika kewajiban tersebut bertentangan dengan kepentingan strategisnya sendiri. Oleh karena itu, organisasi internasional dapat menjadi salah satu aktor yang setara dengan negara dalam perebutan kekuasaan global (Golia & Peters, 2022).

Paradigma fungsionalisme menjadi paradigma terpenting untuk memahami organisasi internasional. Gagasan dasar fungsionalis adalah bahwa alasan keberadaan organisasi internasional adalah pemenuhan tugas-tugas tertentu (fungsi), yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang menyangkut lebih dari satu negara. Hal itu sejalan dengan fenomena

saat ini yakni tidak satu pun dari masalah global dapat dikelola oleh negara berdaulat yang bertindak sendiri, bahkan oleh satu negara adikuasa sekalipun. Fungsi-fungsi yang dikaitkan dengan organisasi tersebut memungkinkan adanya perluasan kekuasaan dan juga batasan pada saat yang sama (Golia & Peters, 2022).

Organisasi internasional memiliki berbagai fungsi, mulai dari mengumpulkan data informasi, menyediakan layanan dan bantuan, memfasilitasi forum untuk negosiasi antarnegara, hingga membantu menyelesaikan konflik perselisihan. Organisasi internasional memiliki peran signifikan dalam menciptakan kerja sama yang stabil melalui pelaksanaan pertemuan rutin, kegiatan pengumpulan serta analisis informasi, penyelesaian sengketa, dan berbagai aktivitas operasional lainnya. (Karns & Mingst, 2004).

Kuatnya posisi organisasi internasional dalam dinamika global menjawab pertanyaan mengapa suatu negara perlu bergabung dengan sebuah organisasi. Kenneth Abbott dan Duncan Snidal (1998) menambah penjelasan pertanyaan ini dengan menyatakan bahwa “organisasi internasional memfasilitasi pemusatan berbagai aktivitas kolektif melalui struktur kelembagaan yang konkret dan stabil. Hal tersebut membuat aktivitas kolektif menjadi lebih efisien dan memperkuat kapasitas organisasi dalam memengaruhi pemahaman, situasi, dan kepentingan negara-negara aggotanya.” Dengan kata lain, negara-negara memilih bergabung agar dapat terlibat dalam forum negosiasi yang stabil, yang

memungkinkan respon cepat ketika terjadi krisis (Karns & Mingst, 2004).

Besarnya pengaruh organisasi internasional turut memperkuat peran organisasi itu sendiri dalam sistem internasional. Dalam bukunya, Clive Archer menggambarkan tiga peran organisasi internasional yakni :

1) Instrumen

Organisasi internasional dapat berperan sebagai instrumen / alat yang dimanfaatkan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Negara sebagai anggota organisasi internasional akan memiliki kewenangan untuk membatasi tindakan independen organisasi internasional agar sejalan dengan kebijakan luar negerinya. Hal tersebut menjadikan organisasi internasional akan diperebutkan oleh negara untuk mendapatkan posisi yang kuat dan memanfaatkannya.

2) Arena

Organisasi internasional dapat berperan sebagai arena atau forum tempat berlangsungnya berbagai tindakan. Organisasi internasional berfungsi sebagai wadah bagi para anggotanya untuk berkumpul, berdiskusi, berdebat, dan menjalin kerja sama. Secara tradisional, organisasi internasional memberikan ruang bagi negara anggota untuk

menyampaikan pandangan dan masukan mereka dalam forum yang lebih terbuka dan publik dibandingkan dengan mekanisme diplomasi bilateral.

3) Aktor

Organisasi internasional dapat berperan sebagai aktor yang dapat bertindak secara signifikan dan mempengaruhi sistem global. Sebagai aktor, organisasi internasional tersebut bersifat independen yang artinya serangkaian kebijakan dan keputusan yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak luar. Kapasitas peran yang dimiliki suatu organisasi internasional bergantung pada adanya resolusi, rekomendasi, atau instruksi yang mendorong sebagian atau seluruh negara anggotanya untuk mengambil tindakan yang berbeda dari tindakan yang biasanya mereka lakukan (Archer, 2001).

Ketiga peran vital tersebut membuat para akademisi semakin memandang organisasi internasional sebagai aktor yang memiliki hak mereka sendiri sehingga menjadi penentu agenda global dan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal tersebut didukung dengan keterlibatan negara-negara yang semakin mengimplementasikan perjanjian dan kebijakan internasional dalam suatu organisasi internasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap organisasi internasional untuk memastikan bahwa setiap negara memenuhi

komitmen mereka sebagai anggota. Sejalan dengan hal tersebut, J. Joachim, B. Reinaldi dan B. Verbeek mengemukakan teori implementasi organisasi internasional yang memberikan peran kepada organisasi internasional untuk menjamin bahwa masing-masing negara menjalankan komitmen internasional dalam mencapai tujuan bersama. Teori tersebut memperkenalkan tiga pendekatan implementasi organisasi internasional yakni sebagai berikut (Joachim, Reinaldi, & Verbeek, 2008) :

1) Pendekatan penegakan (*enforcement approach*)

Pendekatan penegakan menunjukkan bahwa implementasi dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional paling baik dipastikan melalui cara-cara yang bersifat memaksa. Strategi hukuman cukup untuk menegakkan perjanjian ketika masing-masing pihak tahu bahwa jika mereka curang, mereka akan cukup menderita akibat hukuman tersebut. Negara adalah aktor rasional yang mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari menyepakati perjanjian internasional. Oleh karena itu, Pendekatan penegakan hukum akan membuat negara patuh untuk memastikan implementasinya.

Dua instrumen penting dalam pendekatan ini yakni pemantauan dan sanksi. Pemantauan akan meningkatkan transparansi negara-negara yang menjadi pihak dalam

perjanjian dan memastikan bahwa pelanggar terdeteksi. Sanksi merupakan pemberian hukuman bagi mereka yang mengabaikan kewajiban mereka. Pemantauan perilaku dan tindakan pihak-pihak yang terikat perjanjian merupakan hal yang pertama dilakukan sebelum pemberian sanksi. Sanksi dilakukan setelah suatu negara gagal memenuhi komitmen internasionalnya.

Pemantauan dapat dilakukan dengan menjamin negara-negara dalam perjanjian internasional memberikan laporan kemajuan rutin tentang kegiatan mereka di tingkat nasional kepada organisasi internasional yang mengawasi proses implementasi. Sementara itu, sanksi dapat dilakukan dengan mengumumkan dan mempermalukan negara-negara yang tidak patuh dengan melibatkan media ataupun menerbitkan papan skor tentang pelanggaran negara. Hal tersebut akan mempengaruhi reputasi dan kedudukan negara dikancah internasional.

Para akademisi dalam beberapa tahun terakhir menjadi semakin kritis terhadap pendekatan penegakan. Mereka tidak hanya berpendapat bahwa hanya sedikit organisasi internasional yang memiliki mekanisme sanksi (yang efektif) yang dapat mereka gunakan, tetapi mereka juga mempertanyakan kesesuaian tindakan koersif. Mereka

berpendapat bahwa penerapan dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional lebih mengarah pada masalah kemampuan dan kapasitas daripada kemauan.

2) Pendekatan Manajerial

Pendekatan manajerial berawal dari asumsi bahwa keputusan untuk menerapkan atau mematuhi perjanjian internasional adalah suatu proses interaksi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Proses interaksi tersebut berusaha untuk menjawab permasalahan aktor negara dalam mengimplementasikan atau tidak suatu perjanjian internasional. Hal tersebut bisa dikarenakan ambiguitas; keterbatasan sumber daya dan kapasitas negara; dan perubahan sosial atau ekonomi yang tidak dapat dikendalikan. Pada intinya, pendekatan manajerial berfokus pada proses interaksi untuk membuat perjanjian internasional dapat diimplementasikan diberbagai pihak.

Pedekatan manajerial menekankan beberapa peran kepada organisasi internasional dalam proses interaksinya meliputi:

- 1) Melakukan pengawasan melalui berbagai aktor.
- 2) Melakukan kerja sama dengan berbagai aktor. Ketika suatu negara yang terlibat dalam suatu perjanjian internasional tidak memberikan kinerja implementasi yang baik karena alasan

tertentu, maka hal tersebut akan diatasi melalui konsultasi dan analisis bersama, bukan melalui pemberian hukuman.

3) Memberikan bantuan teknis dan keuangan. Mengingat bahwa organisasi internasional umumnya memiliki keahlian khusus, maka mereka dapat memberikan bantuan teknis kepada negara yang bersangkutan. Beberapa organisasi internasional juga dapat meringankan beban yang terkait dengan implementasi dengan memberikan bantuan keuangan.

4) Mendukung peningkatan kapasitas negara anggota. Menurut perspektif manajerial, aktor eksternal seperti organisasi internasional, birokrasi, dan agensi dapat memainkan peran strategis dalam implementasi karena mereka dapat memfasilitasi negara-negara mengembangkan kapasitas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

3) Pendekatan Normatif

Pendekatan ketiga ini menekankan kekuatan normatif organisasi internasional dalam memengaruhi negara untuk mematuhi perjanjian internasional. Menurut pendekatan normatif, daripada memaksa negara atau mengelola implementasi, organisasi internasional menggunakan argumen yang beralasan untuk meyakinkan negara bahwa memenuhi perjanjian internasional mereka adalah hal yang tepat dan benar untuk dilakukan.

Untuk meyakinkan negara, pendekatan ini menganggap otoritas organisasi internasional sebagai sumber daya yang vital. Pengaruh organisasi internasional akan bergantung pada otoritas yang mereka bangun yaitu sejauh mana mereka diakui sebagai ahli dalam bidang isu tertentu dan sejauh mana mereka dianggap tidak memihak. Dengan demikian, kekuasaan bukanlah masalah material, melainkan faktor intersubjektif.

Pengaruh organisasi internasional melalui pendekatan ini bergantung pada aturan dan norma yang mereka promosikan sebagai keahlian mereka. Semakin banyak aturan dan norma yang diperdebatkan dan dipertanyakan, semakin kecil kemungkinan negara akan mengikuti dan menerima mereka. Pengaruh organisasi internasional juga tergantung pada netralitas mereka. Semakin organisasi internasional dipandang oleh pemerintah sebagai pihak yang berat sebelah, semakin kecil kemungkinan mereka untuk membuat pemerintah mematuhi komitmen internasional mereka (Joachim, Reinaldi, & Verbeek, 2008).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep pendekatan manajerial (*managerial approach*) untuk menganalisis peran organisasi GEF. Penulis memilih pendekatan manajerial karena lebih relevan untuk menganalisis peran GEF sebagai organisasi internasional

yang memberikan bantuan keuangan untuk mencapai tujuan bersama. Penulis akan melihat dan mendeskripsikan bagaimana strategi yang dilakukan GEF untuk menyalurkan bantuannya di Kabupaten Bulukumba.

2.2. Bantuan Luar Negeri

Dalam dinamika hubungan internasional saat ini, bantuan luar negeri telah dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan global. Perbedaan kondisi setiap negara menjadi salah satu faktor yang mendorong adanya bantuan luar negeri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Morgenthau yang mengartikan bantuan luar negeri sebagai penyediaan bantuan keuangan maupun material oleh negara maju kepada negara berkembang yang mencakup berbagai bidang. Penyediaan bantuan tersebut tidak lain tidak bukan sebagai pemenuhan kewajiban beberapa negara kaya terhadap banyak negara miskin (Morgenthau, 1962).

Definisi bantuan luar negeri juga dikemukakan oleh Kalevi Jaakko Holsti seorang pakar politik internasional, yang menggambarkan bantuan luar negeri sebagai penyaluran dana, barang, atau bantuan teknis yang diberikan oleh negara donor kepada negara penerima sebagai salah satu instrumen kebijakan yang umum digunakan dalam hubungan internasional. Holsti menyebutkan empat jenis bantuan, yaitu bantuan militer, bantuan teknis, hibah dan program impor komoditas (*grants*), serta pinjaman untuk keperluan pembangunan (Magfira, 2023).

Dalam paradigma hubungan internasional, konsep bantuan luar negeri memiliki perbedaan asumsi dari kaum realis dan liberal. Bagi kaum

realis yang menekankan politik kekuasaan dalam interaksi antarnegara memandang bantuan luar negeri sebagai instrumen atau alat diplomasi yang memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, praktik bantuan luar negeri berfungsi sebagai peningkatan kepentingan nasional negara-negara donor. Kaum liberal sendiri memperlakukan bantuan luar negeri sebagai sarana untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara. Selain itu, kaum liberal juga berpendapat bahwa proyek ataupun program bantuan dari lembaga multilateral akan mewujudkan tata kelola global (Yang & Chen, 2012).

Sebagai instrumen untuk meningkatkan hubungan diplomasi maupun kerja sama, bantuan luar negeri dapat dilihat dalam beberapa kepentingan global. Mengutip kembali tulisan Morgenthau, bantuan luar negeri dapat dikategorikan menjadi 6 jenis sebagai berikut:

1. *Humanitarian foreign aid*, merupakan bantuan yang tidak berorientasi politik melainkan pada isu kemanusiaan. Bantuan ini diberikan ketika suatu negara mengalami bencana alam, seperti banjir, kelaparan, dan epidemi.
2. *Subsistence foreign aid*, merupakan bantuan yang juga berfokus pada isu kemanusiaan dan bersifat *subsisten* artinya bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Bantuan ini bersifat jangka panjang khususnya kepada negara yang tidak memiliki sumber daya untuk mempertahankan layanan publik kemasniaanya.
3. *Military aid*, merupakan bantuan yang ditujukan untuk pendanaan militer termasuk menyediakan pasukan, peralatan tempur, dukungan logistik,

makanan, uang, dan sejenisnya baik ketika terjadi konflik keamanan atau sekedar memperkuat aliansi.

4. *Bribery*, merupakan bentuk bantuan luar negeri yang dilakukan secara terselubung. Praktik penyuapan semacam ini lazim terjadi pada masa kejayaan kolonial Eropa dan dilakukan oleh para raja maupun pejabat pada periode tersebut. Bantuan ini digolongkan sebagai bantuan yang bersifat rahasia karena praktik sogokan kerap disamarkan dengan alasan atau label sebagai bantuan untuk pembangunan ekonomi.

5. *Prestige foreign aid*, merupakan bentuk bantuan luar negeri yang tidak semata-mata diberikan demi membantu negara penerima, tetapi juga untuk memperoleh keuntungan tertentu bagi negara pemberi. Bantuan ini biasanya dimaksudkan untuk meningkatkan citra serta memperkuat hubungan politik antara negara donor dan negara penerima.

6. *Foreign aid for economic development*, merupakan bentuk yang paling umum diberikan pada era modern. Terdapat dua faktor utama yang mendorong pemberiannya, yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi antarnegara serta meningkatnya intensitas kerja sama internasional. Bantuan tersebut tidak hanya berbentuk dana, tetapi juga dapat berupa pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di negara penerima. (Morgenthau, 1962).

Selain keenam kepentingan tersebut, pemberian bantuan luar negeri kini telah berorientasi pada kepentingan lingkungan. Degradasi lingkungan yang ditandai dengan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati,

dan kerusakan ekosistem, telah meningkatkan pentingnya upaya konservasi yang efektif. Upaya tersebut memerlukan investasi tahunan dengan jumlah yang sangat besar. Komitmen fiskal ini menggarisbawahi peran penting bantuan lingkungan bagi negara-negara berkembang yang tertinggal atau tidak memiliki langkah-langkah perlindungan lingkungan yang memadai untuk konservasi keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim (McCarthy, Sternberg, & Banda, 2023).

Bantuan lingkungan didorong oleh perbedaan kepentingan lingkungan antara negara – negara utara yang kaya (negara maju) dengan negara – negara selatan yang miskin (negara berkembang). Kepentingan lingkungan negara utara berfokus pada isu-isu “hijau” seperti perlindungan keanekaragaman hayati dan penipisan ozon, yang cenderung berdampak secara global. Kepentingan lingkungan negara – negara selatan cenderung berfokus pada isu-isu "coklat" yang terkait dengan polusi dan mata pencaharian, termasuk degradasi lahan dan polusi air dan udara (Lewis, 2003).

Perbedaan kepentingan lingkungan tersebut kemudian membuat negara –negara miskin berpendapat bahwa jika negara – negara kaya ingin Selatan melindungi lingkungannya, maka Utara harus menyediakan dana untuk melakukannya. Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (KTT Bumi) di Rio de Janeiro pada tahun 1992, negara-negara di kawasan Selatan meminta negara-negara Utara untuk menyediakan bantuan lingkungan sebagai dukungan dalam

menangani permasalahan lingkungan global. Pada akhirnya bantuan lingkungan hadir yang merupakan transfer keuangan dari Utara ke Selatan untuk tujuan melindungi atau memulihkan lingkungan melalui promosi berbagai proyek mulai dari pendidikan lingkungan hingga konservasi lahan (Lewis, 2003).

Dalam konteks masalah lingkungan global, bantuan lingkungan berfungsi sebagai mekanisme penting bagi negara-negara berkembang yang berupaya mengintegrasikan upaya konservasi dengan pertumbuhan ekonomi di tengah masalah lingkungan global. Distribusi bantuan lingkungan ini secara langsung memengaruhi keberhasilan upaya konservasi global, khususnya di bidang perlindungan lingkungan. Negara-negara maju, sebagai kontributor utama kerusakan lingkungan global melalui kegiatan industri mereka, diminta untuk memberikan bantuan lingkungan kepada negara-negara kurang berkembang. Seruan ini berasal dari rasa tanggung jawab dan keadilan global yang diakui bersama. Sikap ini sejalan dengan pandangan bahwa negara-negara maju memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk mendukung negara-negara berkembang dalam upaya konservasi mereka (McCarthy, Sternberg, & Banda, 2023).

Bantuan lingkungan semakin penting sebagai bentuk kerja sama lingkungan antara negara maju dan berkembang. Seiring dengan meningkatnya skala bantuan lingkungan, maka penting pula memahami efektivitasnya dalam mengatasi masalah lingkungan mengingat skeptisme

masyarakat dikalangan legislatif dan aktivis lingkungan bahwa bantuan pada umumnya gagal mencapai tujuannya (McLean, 2015). Berbagai analisis telah dilakukan oleh beberapa ahli lingkungan untuk melihat sejauh mana dampak dari bantuan lingkungan tersebut. Salah satunya yaitu Robert L. Hicks et al. (2008) yang mengembangkan sebuah konsep bantuan luar negeri yakni *project-level aid* atau PLAID yang digunakan untuk menilai sejauh mana dampak proyek bantuan luar negeri terhadap kondisi lingkungan di negara penerima.

Hicks et al. (2008) mengembangkan lima kategori dalam konsep PLAID sebagai indikator dalam menilai dampak proyek bantuan luar negeri di negara penerima (Dewi, 2020) :

1. *Environmental Strictly Defined* (ESD), merupakan kategori proyek yang dinilai memberikan dampak positif secara langsung terhadap kondisi lingkungan. Proyek bantuan yang tergolong dalam kategori ESD meliputi perlindungan daerah aliran sungai (DAS), konservasi energi, reforestasi, proteksi atau perlindungan terhadap biodiversitas, penyediaan akses air bersih, konservasi tanah, serta proyek mitigasi polusi udara.
2. *Environmental Broadly Defined* (EBD), merupakan kategori proyek pencegahan yang dinilai memberikan dampak positif terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Proyek bantuan yang tergolong dalam kategori EBD meliputi peningkatan efisiensi energi, reboisasi sektor industri, program perencanaan

keluarga, desalinasi, pengembangan keragaman genetik, dan pembangunan berkelanjutan.

3. *Neutral* (N), merupakan kategori proyek yang dinilai tidak memberikan dampak lingkungan secara langsung. Kategori *Neutral* mencakup proyek yang memiliki dampak positif dan negatif yang seimbang terhadap lingkungan. Proyek yang tergolong dalam kategori *neutral* adalah proyek ekonomi seperti promosi pasar bebas, dukungan bagi wirausaha kecil dan menengah, peningkatan aktivitas ekspor, bantuan pendidikan dan kesehatan, proyek telekomunikasi beserta infrastrukturnya, serta bantuan darurat bencana alam.
4. *Dirty Broadly Defined* (DBD), merupakan proyek yang dinilai memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dalam jangka menengah maupun panjang. Proyek yang tergolong dalam kategori DBD umumnya bergerak pada sektor agrikultur, pengembangan tenaga hidroelektrik, bioteknologi, pembangkit dan distribusi listrik, serta proyek transportasi umum.
5. *Dirty Strictly Defined* (DSD), merupakan kategori proyek yang secara langsung menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain merusak, proyek dalam kategori DSD juga dapat mengancam ketersediaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Proyek bantuan yang tergolong dalam kategori DSD antara lain proyek industri berat seperti pupuk, pertambangan, penebangan

hutan dengan pertumbuhan lambat, serta pembangunan jalan raya dan infrastruktur transportasi (Dewi, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus membahas bantuan multilateral GEF sebagai bantuan lingkungan yang telah memberikan bantuan pembiayaan proyek berbasis lingkungan kepada Indonesia. Penulis akan menggunakan konsep PLAID Robert L. Hicks untuk menggambarkan dampak implementasi program bantuan luar negeri terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Bulukumba. Penulis akan mengelompokkan dampak bantuan GEF ke dalam konsep PLAID tersebut sehingga akan mendeskripsikan implikasi bantuan GEF di Kabupaten Bulukumba.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Ika Zahara Qur'ani (2014) yang berjudul “Bantuan Multilateral Global Environment Facility Terhadap Cina” membahas terkait faktor apa yang membuat Cina menjadi negara dengan penerima bantuan GEF terbanyak dan bagaimana dampak bantuan tersebut terhadap Cina. Berdasarkan hasil analisis penulis, Cina mendapatkan banyak bantuan dikarenakan adanya kepentingan ekonomi negara – negara pendonor yang ditunjukkan dengan tingginya impor teknologi bersih dari Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Perancis. Terkait dampak bantuan, berdasarkan hasil survey kepada sejumlah pihak masyarakat dan pejabat Cina, bantuan GEF berkontribusi penting dalam membangun kapasitas lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap lingkungan,

meningkatkan inovasi teknologi hijau, serta memperluas lapangan kerja (Qur'ani, 2014).

Dalam penelitian lain, Zelya Nadia Kirana (2022) yang membahas “Peran UNDP-GEF dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu melalui Proyek Epass Periode 2016-2020” menjelaskan bahwa tingginya kegiatan masyarakat di sekitar kawasan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan besar tekanan dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu terancam. Oleh karena itu diperlukan peran internasional untuk melakukan pemberdayaan masyarakat kawasan tersebut. Berdasarkan hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa bahwa melalui proyek EPASS, UNDP/GEF telah memberikan banyak bantuan teknis maupun finansial kepada masyarakat sehingga mendorong peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Selain itu, UNDP/GEF mendorong terwujudnya kerja sama yang harmonis antara Balai Besar TNLL dengan pemerintah desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (Kirana, 2022).

Berbagai penelitian tersebut telah menggambarkan bagaimana keberhasilan implementasi bantuan dan peran GEF baik secara umum dari prespektif negara maupun secara spesifik pada salah satu program bantuan GEF. Oleh karena itu, penulis hendak membahas implementasi bantuan GEF dalam mengatasi masalah lingkungan di Indonesia melalui proyek “*Sevent Operational Phase of The GEF Small Grants Programme in Indonesia*” Di Bulukumba. Penulis akan menggambarkan bagaimana

strategi yang dilakukan oleh GEF untuk melaksanakan proyek tersebut dan menganalisis dampak lingkungan yang dihasilkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Permasalahan lingkungan di Indonesia

Masalah lingkungan dalam hubungan internasional menjadi tantangan kontemporer yang memerlukan tanggung jawab global. Para ilmuwan HI sepakat bahwa masalah lingkungan menjadi masalah bersama yang paling mendesak untuk segera ditangani melalui pendekatan - pendekatan secara global (Bakry, 2017). Joyce Kaufman menyebut masalah lingkungan tidak lagi mengenal batas negara, degradasi lingkungan disuatu negara akan berdampak terhadap negara lain. Dampak masalah lingkungan tersebut dapat memengaruhi agenda diplomatik, kebijakan perdagangan, dan perjanjian internasional (Vogler, 2017).

Charley Cameron menyebut ada enam masalah lingkungan yang bersifat global dan membutuhkan upaya bersama yaitu masalah pembabatan hutan (deforestation), pemanasan global, masalah limbah, keamanan energi, keamanan pangan, dan dampak transportasi. Adapun UNEP memisahkan masalah lingkungan global menjadi empat kategori yaitu:

1. Masalah yang berkaitan dengan atmosfer, seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan populasi udara
2. Masalah yang berkaitan dengan tanah, seperti deforestasi, desertifikasi, alih guna tanah, dan lahan kritis
3. Masalah yang berkaitan dengan air, masalah ekosistem daratan, pantai dan laut
4. Masalah yang berkaitan dengan punahnya keanekaragaman hayati